

# NEWSLETTER

VOLUME II  
JUNI 2025



## POLITIK, PAJAK, DAN PANGGUNG EKONOMI: MENCARI ARAH BARU UNTUK PERTUMBUHAN INKLUSIF

 **FISI PRIMA CONSULTING**  
TAX, LAW & MANAGEMENT • ADVISORY

CONNECT WITH US:

+62-21 2253 7918

[www.ofisiprima.com](http://www.ofisiprima.com)

AKR Tower 17th Floor Unit A-B,  
Jl. Panjang No.5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat,  
DKI Jakarta, 11530, Indonesia

### KONTEN:

Transisi Politik & Konsistensi Fiskal

Strategi Fiskal Dalam Tekanan Global

Menyambut Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) Baru

Pajak Sebagai Cermin Relasi Negara dan Rakyat



## REDAKTUR

### Pemimpin Redaktur

Assoc. Prof. Dr. Edy Gunawan, S.E., Ak., S.H., M.Ak., M.H.,  
M.Kn., BKP., CLA, Mediator, CertDa, CIISA

### Wakil Pemimpin Redaktur

Henro Susanto, S.Kom., M.H., BKP., CIISA

### Pelaksana Redaktur

Troy Aldi Pratama

### Editor

Sesilia Delonita Pricillya

### Editor

Reni Musdalipa

### Desain Grafis & Ilustrator

Dini Aulia

### Riset & Kontributor Lapangan

Ario Azhar Jauhari

## ALAMAT

### OFISI PRIMA CONSULTING

AKR Tower 17<sup>th</sup> Floor Unit A-B  
Jl. Panjang No.5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat,  
DKI Jakarta (11530), Indonesia

Phone: +62-21 2253 7918

Website: [www.ofisiprima.com](http://www.ofisiprima.com)

---

### AKUN RESMI OFISI

 [ofisiprima.com](http://ofisiprima.com)

 [ofisiprimaconsulting](https://www.instagram.com/ofisiprimaconsulting)

 [Ofisi Prima Consulting](https://www.linkedin.com/company/ofisi-prima-consulting)

## KEKUASAAN FISKAL DI TENGAH DINAMIKA: KETIKA PAJAK MENJADI CERMIN BANGSA

Pada saat dunia sedang bergulat dengan efek domino geopolitik, krisis pangan, ketegangan perdagangan, dan perubahan iklim yang tak terbendung, negara-negara menghadapi pertanyaan paling mendasar: Apakah sistem fiskal yang kita miliki masih mampu menopang pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan?

Di ruang sidang parlemen, di antara baris laporan APBN, hingga ke meja makan keluarga menengah bawah, satu kata kunci mengemuka pajak, dimana tak lagi sekadar angka pungutan atau beban administratif—tetapi menjadi indikator dari relasi antara negara dan rakyat. Apakah sistem perpajakan kita hari ini masih memberi ruang tumbuh bagi dunia usaha dan masyarakat, atau justru memperbesar jurang ketimpangan?

Dalam praktik politik modern, kebijakan fiskal telah menjadi arena pertarungan nilai: Apakah negara lebih memilih keberanian dalam keadilan, atau bertahan dalam populisme jangka pendek?



Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi semakin relevan ketika Indonesia baru saja melewati fase penting dalam siklus politik nasional. Dalam momen transisi pemerintahan, publik menaruh harapan pada arah fiskal yang lebih nyata, berpihak, dan menjawab tantangan global secara strategis.

Oleh karena itu, edisi Juni 2025 ini mengajak pembaca untuk menelaah dinamika kebijakan fiskal Indonesia dari tiga sisi utama:

- Konsistensi fiskal pasca pemilu dalam bingkai transisi politik
- Strategi pemerintah RI dalam menghadapi tekanan global melalui bauran kebijakan fiskal
- Pembaruan regulasi melalui RPMK baru sebagai upaya membangun sistem perpajakan yang lebih profesional dan berintegritas

Melalui infografik, data, dan analisa naratif, edisi ini mengajak kita semua untuk melihat bahwa setiap keputusan fiskal bukanlah tindakan teknokratik semata, melainkan cerminan keberanian moral dan kepemimpinan publik. Pajak dan anggaran bukan hanya alat hitung, tapi cermin nilai dan arah bangsa.



sumber foto: lrtjakarta.co.id

## TRANSISI POLITIK & KONSISTENSI FISKAL

### Menakar Arah Kebijakan setelah Gelombang Pemilu

Pemilu telah usai, namun babak pemerintahan baru sesungguhnya baru dimulai. Dari pusat hingga daerah, ruang-ruang kebijakan kini diisi oleh wajah-wajah baru dan semangat lama yang dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan zaman.

Namun satu pertanyaan utama tetap bergema: Apakah perubahan politik membawa konsistensi fiskal atau justru menambah keraguan?



sumber foto: tim redaksi Ofisi

Dalam sistem demokrasi seperti Indonesia, stabilitas ekonomi tak pernah berdiri sendiri. Ia adalah hasil dari kemampuan politik untuk menjamin arah kebijakan yang teguh, responsif, dan berpihak. Sayangnya, dalam beberapa dekade terakhir, kita sering menyaksikan bagaimana politik anggaran cenderung jangka pendek, dipenuhi kompromi populisme, atau terjebak pada ritme birokrasi yang kaku.

Padahal, ketika negara menetapkan pajak sebagai sumber utama pembangunan, maka pijakan politik yang cerdas dan berani menjadi penentu arah. Hal ini menyangkut:

- Keberanian mereformasi tarif pajak dengan tetap menjaga insentif usaha,
- Kesiapan memperbaiki ketimpangan dengan kebijakan fiskal distributif,
- Hingga komitmen membangun institusi hukum pajak yang kuat, bersih, dan akuntabel.

### Rekam Jejak Politik Fiskal

Dalam konteks ini, pembaca OFISI akan diajak untuk tidak sekadar memahami data dan regulasi, namun juga membedah makna tersirat di balik kebijakan: melihat bagaimana keputusan politik saat ini berpengaruh terhadap masa depan ekonomi nasional. Guna mendukung pembahasan korelasi antara keputusan politik dan perkembangan ekonomi, berikut data yang disajikan:

PERIODE	CATATAN POLITIK & FISKAL
2000 - 2004	REFORMASI PASCA KRISIS, PENGUATAN INSTITUSI FISKAL AWAL
2005 - 2014	KONSOLIDASI FISKAL : STABIL DI 11 - 12%
2015 - 2019	TAX AMNESTY & AWAL DIGITALISASI : STAGNASI DI 10 - 11%
2020 - 2024	PANDEMI + PEMULIHAN EKONOMI: DEFISIT MELEBAR, RASIO MEMBAIK MELALUI EKSTENSIFIKASI

Sumber: World Bank Indonesia Economic Update 2023

Di awal pemerintahan baru ini, momentum fiskal berada di titik krusial: apakah akan menjadi sarana koreksi terhadap krisis global, atau terjebak dalam logika defensif semata? Untuk itu, edisi ini melanjutkan dengan membahas dua topik penting yang menjadi jantung kebijakan saat ini: strategi fiskal Indonesia disusun untuk menghadapi tekanan global dan pembaruan RPKM tentang kuasa hukum pajak—harus dilihat sebagai satu kesatuan: antara keberanian menata tarif dan integritas dalam menegakkannya. Selengkapnya, simak pembahasan berikut.

## STRATEGI FISKAL DALAM TEKANAN GLOBAL

### Kebijakan Pemerintah RI Menjaga Daya Tahan Ekonomi dan Kepercayaan Publik

Indonesia kini berada di persimpangan krusial dalam lintasan ekonomi global. Perlambatan pertumbuhan Tiongkok, suku bunga tinggi dari *The Fed*, konflik geopolitik yang merambat dari Timur Tengah ke pasar energi, serta sentimen proteksionis dari AS dan Eropa, menciptakan tekanan kompleks terhadap stabilitas fiskal nasional.

Namun sebagaimana ditegaskan dalam pidato pembukaan Sidang Paripurna DPR RI Juni 2025, “tugas besar negara saat ini bukan hanya menjaga angka defisit, tetapi memastikan APBN mampu menjadi tameng bagi masyarakat kecil dan pengungkit kepercayaan pelaku usaha.” Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana fiskal menjadi bukan sekadar alat teknokratik, tetapi instrumen kepemimpinan negara.

Di tengah situasi ini, publik menanti lebih dari sekadar narasi pertumbuhan. Masyarakat menginginkan arah kebijakan nyata—yang menyentuh kebutuhan dasar, membuka ruang kerja, menjaga daya beli, serta memastikan keberlangsungan sosial. Oleh karena itu, strategi fiskal Indonesia harus menjawab tantangan global dengan pendekatan yang adaptif, strategis, dan inklusif.



sumber foto: detik.com



sumber foto: bbc.com

# STRATEGI FISKAL DALAM TEKANAN GLOBAL

## TANTANGAN GLOBAL & STRATEGI FISKAL INDONESIA 2025



Sumber: BI (Juni 2025), Kemenkeu RI (Outlook APBN 2025 & RAPBN 2026), CSIS Indonesia, World Bank, INDEF, LPEM FEB UI

### Tantangan Global, Tekanan Nyata

Melalui infografik “Tantangan Global & Strategi Fiskal Indonesia 2025”, edisi ini menyoroti lima tekanan utama yang memengaruhi ruang fiskal Indonesia:



Guna menghadapi tekanan-tekanan ini, pemerintah menjawab dengan strategi fiskal yang sudah dirumuskan dan diumumkan, demi menjaga fondasi ekonomi sembari memancarkan keberanian fiskal yang matang.

## Lima Pilar Strategi Fiskal Pemerintah RI

Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan dalam Outlook APBN 2025 dan pemaparan awal RAPBN 2026, serta diamini oleh berbagai ekonom nasional dan pelaku pasar, pemerintah mengambil jalur strategi sebagai berikut:



### 1. Belanja *Countercyclical*

Fokus pada perlindungan sosial, subsidi energi, dan ketahanan pangan untuk menjaga daya beli rakyat. Dana cadangan fiskal mulai diaktifkan sebagai penyeimbang tekanan global.



### 2. Insentif Fiskal untuk Sektor Strategis

Khususnya sektor *green economy*, transformasi digital UMKM, dan penguatan pertanian. Ini memberi sinyal bahwa fiskal diarahkan untuk mendukung pertumbuhan jangka menengah yang inklusif.



### 3. Ekstensifikasi & Digitalisasi Perpajakan

Memperluas basis pajak tanpa menaikkan tarif, melalui Coretax, penggunaan NIK sebagai NPWP, serta perluasan layanan daring pajak untuk sektor informal dan startup.



### 4. Refocusing & Efisiensi Belanja

Belanja negara yang tidak produktif dipangkas dan dialihkan ke program berdampak langsung terhadap masyarakat, sambil menjaga defisit tetap terkendali di bawah kerangka fiskal jangka menengah.



### 5. Penguatan Kepastian & Kredibilitas Fiskal

Melalui koordinasi Menkeu-BI, dukungan parlemen, serta sinyal fiskal jangka menengah yang konsisten untuk menjaga iklim investasi dan mendorong perusahaan-perusahaan IPO tumbuh lebih sehat.

## Pajak dan Belanja Negara sebagai Wajah Kepemimpinan Publik

Dalam masa transisi politik ini, sistem fiskal Indonesia menjadi panggung uji kepemimpinan:

**Apakah kebijakan kita masih berpihak pada keadilan dan keberlanjutan, atau justru hanya menyelamatkan angka dalam laporan anggaran?**



Melalui strategi yang ditampilkan secara visual dan naratif dalam edisi ini, kami mengajak pembaca OFISI untuk tidak hanya menjadi pengamat pasif, tetapi bagian dari ekosistem fiskal yang sehat—baik sebagai pelaku usaha, konsultan, regulator, maupun pembayar pajak yang kritis. Karena sejatinya, pajak bukan sekadar pungutan, dan APBN bukan sekadar neraca. Keduanya adalah kontrak moral antara negara dan rakyatnya.

## MENYAMBUT RPMK BARU: STANDAR BARU KUASA HUKUM PENGADILAN PAJAK

Di tengah upaya berkelanjutan untuk membenahi sistem peradilan pajak, pemerintah kini tengah merancang satu regulasi penting yang pantas disambut secara antusias: Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak. Draft peraturan ini tidak hanya bersifat administratif, namun menyentuh akar profesionalisme dan integritas dalam praktik pendampingan hukum perpajakan.

Seiring meningkatnya jumlah perkara pajak serta keragaman subjek yang disengketakan, kebutuhan akan kuasa hukum yang kompeten, etis, dan dapat dipercaya menjadi semakin penting. Sayangnya, selama ini, tidak sedikit pihak yang merasa bahwa kehadiran kuasa hukum dalam sidang pajak belum sepenuhnya menjamin kualitas pembelaan yang profesional. RPMK baru hadir sebagai respons atas kegelisahan ini, sekaligus sebagai tonggak pembaruan sistemik.



### APA YANG BERUBAH DARI REGULASI SEBELUMNYA?

RPMK ini dirancang sebagai pemutakhiran atas PMK No. 184/PMK.01/2017, yang selama ini mengatur persyaratan dasar menjadi kuasa hukum di Pengadilan Pajak. Dalam RPMK terbaru, cakupan diperluas secara signifikan, mencakup juga proses permohonan, perpanjangan, pencabutan izin, serta klasifikasi izin kuasa hukum berdasarkan bidang dan jenjang keahlian.



sumber foto: tim redaksi Ofisi

Beberapa perubahan penting yang patut disoroti, antara lain:

- Peningkatan standar kompetensi, dengan mewajibkan adanya Surat Keterangan Kompetensi (SKK) atau Izin Praktik dari lembaga resmi di lingkungan Kementerian Keuangan.
- Pengalaman kerja minimal 2 tahun dalam 5 tahun terakhir di bidang perpajakan, akuntansi, hukum, atau kepabeanan/cukai sesuai bidang praktik.
- Pembagian klasifikasi izin menjadi Tingkat A, B, C untuk perpajakan, serta izin terpisah untuk bidang kepabeanan dan cukai.
- Penguatan nilai integritas: calon kuasa hukum harus memiliki rekam jejak baik, tidak pernah dipidana berat, serta wajib membuat akun dan menggunakan sistem informasi resmi dari Pengadilan Pajak.

Langkah-langkah ini akan membawa pengaruh besar terhadap kualitas proses peradilan. Dengan adanya sistem klasifikasi, misalnya, akan lebih mudah memetakan tingkat kompetensi kuasa hukum yang menangani perkara kompleks dibanding perkara yang bersifat administratif sederhana. Sistem ini juga membuka peluang bagi kuasa hukum muda untuk naik jenjang secara profesional, selama memenuhi syarat yang ditetapkan.

## Apa Manfaatnya Bagi Dunia Usaha?

**D**ari sisi pelaku usaha, terutama para wajib pajak yang tengah menghadapi sengketa, RPMK ini memberikan jaminan mutu. Tidak lagi sekadar bergantung pada reputasi atau relasi personal, kini keandalan kuasa hukum ditentukan secara objektif melalui indikator yang terverifikasi. Ini tentu mendorong rasa aman dan kepercayaan dalam proses pembelaan hak-hak perpajakan.

Di sisi lain, regulasi ini juga menjadi peluang bagi para konsultan pajak profesional. Sebab SKK yang diperoleh tidak hanya berlaku untuk izin sebagai kuasa hukum, tetapi juga dapat digunakan untuk pengajuan izin sebagai konsultan pajak. Artinya, satu jalur pembuktian kompetensi kini dapat melayani dua peran profesional sekaligus—efisiensi yang layak dimanfaatkan oleh para praktisi.

Tak kalah penting, pembaruan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun integritas kelembagaan. Dalam konteks reformasi birokrasi, sistem digital yang mewajibkan setiap kuasa hukum membuat akun resmi dan menyampaikan dokumen lewat sistem informasi Pengadilan Pajak merupakan bentuk transisi menuju tata kelola peradilan pajak yang lebih transparan dan terdokumentasi.

### Catatan untuk Dunia Pendidikan dan Regulator

RPMK ini secara tidak langsung menuntut sinergi dari berbagai pihak. Dunia pendidikan tinggi harus mulai menyesuaikan kurikulum agar relevan dengan syarat kompetensi dalam regulasi ini. Lembaga pelatihan perpajakan juga perlu menyesuaikan modul dan pembuktian hasil belajar dengan standar SKK yang dibutuhkan. Sementara itu, regulator juga harus siap membangun sistem digital yang ramah pengguna dan menjaga kerahasiaan serta integritas data wajib pajak yang diwakili.



sumber foto: tim redaksi Ofisi



sumber foto: mapio.net

## Apa Manfaatnya Bagi Dunia Usaha?

# PERBANDINGAN PMK LAMA DENGAN RPMK BARU

Perbandingan	PMK Lama (No.184/2017)	RPMK Baru (Draft 2025)
<b>Judul Regulasi</b>	Persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak	Persyaratan, Permohonan, Perpanjangan, dan Pencabutan sebagai Kuasa Hukum
<b>Definisi Kuasa Hukum</b>	Orang perseorangan yang dapat mendampingi/mewakili pihak bersengketa	WNI dengan pengetahuan perpajakan + syarat tambahan
<b>Persyaratan Keahlian</b>	Ijazah, brevet  <small>*sertifikat keahlian, pengalaman kerja *khusus kepabeanaan dan cukai</small>	Wajib SKK/Izin Praktik +  *pengalaman 2 tahun  <small>*pengalaman kerja bidang Perpajakan/akuntansi/hukum/kepabeanaan dan cukai</small>
<b>Persyaratan Lain</b>	NPWP, Tanda Terima SPT 2 tahun terakhir, SKCK, bukan PNS, pakta integritas	Tidak memiliki hubungan istimewa dengan yang dikuasakan, tambahan syarat perilaku, integritas, tidak pernah dipidana, bukan PNS, buat akun di sistem informasi
<b>Klasifikasi Izin</b>	Tidak diatur	Dibagi: Tingkat A, B, C (perpajakan) + kepabeanaan & cukai
<b>Jangka Waktu Izin</b>	Tidak diatur dalam PMK (hanya diatur dalam PERKA)	2 tahun sejak penerbitan
<b>Perpanjangan Izin</b>	Tidak diatur dalam PMK (hanya diatur dalam PERKA)	Diatur dengan syarat SKK aktif, WP aktif, dan perilaku baik
<b>Pencabutan Izin</b>	Tidak diatur	Izin dicabut bila data palsu, tidak dibuat akun, atau dipidana

Sumber: Data Olahan Tim Redaksi

### Perubahan Bukan Sekadar Administrasi

RPMK ini adalah cerminan pergeseran cara pandang kita terhadap proses hukum perpajakan: dari sekadar prosedur, menjadi arena profesionalisme dan keadilan. Dalam konteks ini, para pembaca OFISI—baik Anda yang bergerak di bidang konsultan, perusahaan swasta, maupun pelaku kebijakan—perlu mencermati perubahan ini secara seksama dan menjadikannya bagian dari strategi kepatuhan dan mitigasi risiko hukum pajak di masa mendatang.

## PAJAK SEBAGAI CERMIN RELASI NEGARA DAN RAKYAT



sumber foto: vogue.co

Dalam arsitektur ekonomi politik masa kini, kekuatan fiskal suatu bangsa tak lagi sekadar diukur dari seberapa besar negara mampu memungut penerimaan, melainkan dari seberapa tinggi kepercayaan rakyat dalam membayar pajak secara sukarela, adil, dan sadar.



sumber foto: tim redaksi Ofisi

Pajak bukan sekadar kewajiban administratif—ia adalah kontrak kepercayaan antara negara dan warganya, dan pada akhirnya, refleksi dari cara kita memilih untuk hidup bersama dalam satu republik.

Melalui edisi Juni ini, redaksi OFISI ingin menegaskan bahwa masa depan fiskal Indonesia tidak hanya dibentuk oleh instrumen anggaran atau skema perpajakan semata. Ia ditentukan oleh konsistensi politik pasca pemilu, ketegasan strategi pemerintah dalam menghadapi tekanan global, dan keseriusan negara dalam membangun sistem perpajakan yang adil, profesional, dan terpercaya.

Ketika kebijakan fiskal memberi ruang bagi dunia usaha untuk tumbuh, memberi kepastian hukum kepada yang taat, serta menjangkau kelompok rentan dengan keberpihakan, maka APBN tak lagi menjadi alat teknokratik semata—tetapi menjelma sebagai sarana perjuangan kolektif untuk keadilan dan pembangunan yang inklusif.

## PAJAK SEBAGAI CERMIN RELASI NEGARA DAN RAKYAT



sumber foto: tim redaksi Ofisi

Jika kita ingin melihat Indonesia menjadi negara yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tapi juga adil secara sosial dan berdaulat secara fiskal, maka reformasi perpajakan dan penguatan integritas fiskal adalah babak yang tak boleh ditunda.

OFISI akan terus hadir menyuarakan isu-isu mendasar yang mempengaruhi arah kebijakan, ruang usaha, dan kepercayaan publik. Kami percaya, pembaca seperti Anda—baik sebagai profesional, pengusaha, aparatur, maupun warga negara—memiliki peran dalam mengawal arah perubahan ini.

Karena pada akhirnya, fiskal bukan hanya soal angka—tetapi soal nilai. Nilai tentang siapa yang dilayani, siapa yang dilindungi, dan untuk siapa republik ini dibangun.



### Tahukah Kamu?

- Ekonomi kerakyatan bukanlah istilah baru dalam perbendaharaan gagasan bangsa. Jauh sebelum koperasi digaungkan sebagai sistem ekonomi alternatif, Ki Hajar Dewantara telah menyebut ekonomi kerakyatan sebagai sistem yang “menjiwai rakyat dan menghidupi rakyat”—mendasarkan ekonomi pada gotong royong, bukan dominasi modal.
- Koperasi pertama di Indonesia lahir di Purwokerto tahun 1896. Digagas oleh R. Aria Wirjaatmadja, koperasi ini awalnya dibentuk sebagai bank pertolongan bagi guru dan petani dari jerat lintah darat. Gagasan tersebut kemudian menginspirasi Bung Hatta, yang pada akhirnya dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia—memperjuangkan sistem ekonomi yang menempatkan manusia sebagai pusat, bukan semata laba.



 **FISI PRIMA CONSULTING**  
TAX, LAW & MANAGEMENT • ADVISORY

CONNECT WITH US:

 +62-21 2253 7918

 [www.ofisiprima.com](http://www.ofisiprima.com)

AKR Tower 17th Floor Unit A-B,  
Jl. Panjang No.5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat,  
DKI Jakarta, 11530, Indonesia